

PERUBAHAN RENCANA KERJA



KECAMATAN BUKI

KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2025 merupakan kewajiban bagi setiap lembaga pemerintah seperti Badan, Kantor serta Instansi Pemerintah yang lain. Perubahan RENJA SKPD disamping berfungsi sebagai pedoman kerja dan dokumen, juga diharapkan menyatukan visi, misi, persepsi, strategi seluruh aparat Kecamatan Buki dalam membina, melayani dan memfasilitasi pembangunan dan pemberdayaan menuju masyarakat yang mandiri, serta untuk dapat mengevaluasi kinerja SKPD ditahun-tahun sebelumnya dan diharapkan untuk bias memacu kinerja pada tahun yang akan datang, terutama peningkatan kualitas sumber daya manusia pada SKPD.

Dengan adanya dokumen ini diharapkan setiap prioritas program yang telah ditetapkan beserta targetnya dapat dijadikan acuan utama bagi pelaksanaan kinerja yang ada pada SKPD Kecamatan Buki, yang akhirnya mampu mewujudkan VISI dan MISI Kabupaten Kepulauan Selayar.

Kami menyadari Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Buki masih banyak kekurangannya oleh karena itu kami mohon masukan dari Stakeholder baik dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar maupun Dinas Instansi lainnya serta pihak swasta dan masyarakat guna meningkatkan efektivitas Perencanaan kegiatan yang strategis Kecamatan Buki dimasa yang akan datang.

Baruia, 21 April 2025

CAMAT BUKI

DEMPAK, S. Pd

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP. 19690921 199203 1 010

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	6
Sistematika	
1.4 Penulisan.....	6
BAB II EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II (TAHUN BERJALAN)	8
Evaluasi Renja Kecamatan Buki Sampai dengan Triwulan II Tahun	
2.1 2025	8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Buki.....	21
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD	22
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	24
BAB IV PENUTUP.....	32

Bab I

Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kecamatan Buki Menyusun Perubahan Renja Kecamatan Buki Tahun 2025 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Buki. Perubahan Renja Kecamatan Buki Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Renstra Kecamatan Buki Tahun 2021-2026 dan mengacu pada Perubahan RKPD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025.

Perubahan Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan RKA Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Perubahan Renja

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Buki tahun 2023 didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) ;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287) ; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perokonomian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516) ;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4310); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perokonomian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516) ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perokonomian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516) ;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700) ;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah no 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312)
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan keuangan daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 288);
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050 - 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

22. Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 113);
24. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 6);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan Buki (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2007 Nomor 16);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2005 – 2025 Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2009 Nomor 10);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2011 Nomor 3);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2012 – 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2012 Nomor 05);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 81 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan Buki (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 529, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Nomor 47)

31. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Selayar 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 Nomor)
32. Peraturan Bupati Kepulauan selayar Nomor 60 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 Nomor 847)

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Rencana kerja Kecamatan Buki Tahun 2025 disusun dengan maksud untuk :

1. Menetapkan kebijakan, Perubahan program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan periode Tahun 2025 yang mengacu visi, misi dan program Kabupaten Kepulauan Selayar guna mendorong partisipasi aparatur dan masyarakat di wilayah Kecamatan Buki;
2. Menetapkan pedoman dalam penyusunan Perubahan program, kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Buki Tahun 2025;
3. Mewujudkan sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan daerah antara Perubahan Renja Kecamatan Buki dengan Perubahan RKPD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025.

Adapun tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Buki untuk memberikan arahan sekaligus pedoman bagi unit kerja dalam lingkup Kecamatan Buki dalam melaksanakan pembangunan guna mewujudkan visi dan misi Kabupaten Kepulauan Selayar sesuai Rencana Strategis Kecamatan Buki Tahun 2021 – 2026

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Buki Tahun 2025 disusun berdasarkan sistematika berikut :

Bab I Pendahuluan

Berisi Latar Belakang penyusunan Renja ini, dasar hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika pembahasan.

Bab II Evaluasi Renja Kecamatan Buki Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025

Memuat : (1) kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Buki tahun lalu dan perkiraan capaian tahun

berjalan, (2) analisis kinerja pelayanan OPD, (3) isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD,

Bab III Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah

Berisikan Rencana Kerja Kecamatan Buki terdiri dari Rencana Program, Rencana Kegiatan dan Sub Kegiatan serta indikator kinerja

Bab IV Penutup

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, serta kaidah-kaidah pelaksanaan, dan Rencana tindak lanjut.

Bab II

Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II (Tahun Berjalan)

2.1 Evaluasi Renja Kecamatan Buki sampai dengan Triwulan II Tahun 2025

Pelaksanaan evaluasi ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Rencana Kerja SKPD sampai dengan triwulan II tahun 2025, serta mengetahui hambatan dan permasalahan yang dihadapi

Berikut ini akan diuraikan mengenai kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Buki Triwulan II Tahun Anggaran 2025 serta progres pencapaian kinerja, sehingga dapat teridentifikasi sampai sejauh mana Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar telah melaksanakan program dan kegiatannya.

Anggaran Kecamatan Buki tahun 2025 sebesar Rp 2,305,023,000,- dengan realisasi keuangan sampai dengan 21 April 2025 (Triwulan II) ini sebesar Rp 392,110,313,- dengan persentase capaian keuangan 14,60 % (sangat rendah) dan rata-rata capaian kinerja sebesar 18,84 % (sangat rendah). Sesuai dengan tabel beriku ini

Tabel 2.1

Evaluasi Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025

Kabupaten Kepulauan Selayar

SKPD : Kecamatan Buki

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah	Indikator Kinerja Program	Target Renstra OPD pada Tahun 2021- 2026 (akhir periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD Tahun		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja		Realisasi kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2025 (Ahkir		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Unit OPD penanggung g jawab	Status Capaian Kinerja Tahun
			6		7		8		9		10		13=9+10+11+12		14=7+13		15=14/6x100			
3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Persentase Capaian Kinerja (%)	72,31	5.711.450.226	0,00	1.906.876.245	71,51	2.180.253.000	0	378.670.313			0	378.670.313						Belum Tercapai
	PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Capaian Kinerja Keuangan (%)	95,00		0,00		91,00		0				0							Belum Tercapai
7.01.01.2. 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu (%)	100,00	47.000.000	38,10	16.365.600	100,00	15.300.000	0,00%	7.050.000			0,00%	7.050.000	54,76%	23.415.600	54,76%	49,82%	KECAMA TAN BUKI	
7.01.01.2. 01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7	5,500,000	2	1,807,000	3	2,400,000	0	0			0	0	2	1,807,000	28,57%	32,85%	KECAMA TAN BUKI	Belum Tercapai
7.01.01.2. 01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	3	9,000,000	1	4,219,300	1	3,000,000	1	3,000,000			1	3,000,000	2	7,219,300	66,67%	80,21%	KECAMA TAN BUKI	Tercapai

7.01.01.2. 01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3	8,500,000	1	2,314,500	1	3,000,000	0	0			0	0	1	2,314,500	33,33%	27,23%	KECAMA TAN BUKI	Belum Tercapai
7.01.01.2. 01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	3	10,000,000	1	2,933,500	1	2,700,000	1	2,700,000			1	2,700,000	2	5,633,500	66,67%	56,34%	KECAMA TAN BUKI	Tercapai
7.01.01.2. 01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	3	7,000,000	1	2,809,500	1	2,100,000	0	0			0	0	1	2,809,500	33,33%	40,14%	KECAMA TAN BUKI	Belum Tercapai
7.01.01.2. 01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	3	7,000,000	2	2,281,800	1	2,100,000	1	1,350,000			1	1,350,000	3	3,631,800	100,00%	51,88%	KECAMA TAN BUKI	Tercapai

7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	% Penyusunan Dokumen laporan Keuangan Tepat Waktu (%)	100,00	4.227.240.000	34,81	1.616.176.595	100,00	1.717.923.000	0,00%	334.503.413			0,00%	334.503.413	37,04%	1.950.680.008	37,04%	46,15%	KECAMA TAN BUKI	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45	4,216,740,000	17	1,613,052,895	15	1,715,223,000	3	334,503,413			3	334,503,413	20	1,947,556,308	44,44%	46,19%	KECAMA TAN BUKI	Belum Tercapai
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3	3,500,000	1	1,123,700	1	900,000	0	0			0	0	1	1,123,700	33,33%	32,11%	KECAMA TAN BUKI	Belum Tercapai
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12	7,000,000	4	2,000,000	4	1,800,000	0	0			0	0	4	2,000,000	33,33%	28,57%	KECAMA TAN BUKI	Belum Tercapai
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Prosentase Penataan barang milik daerah yang tertib, teratur dan efektif (%)	100,00	15.000.000	66,67	3.378.000	100,00	2.550.000	0,00%	0			0,00%	0	66,67%	3.378.000	66,67%	22,52%	KECAMA TAN BUKI	

7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	3	15,000,000	2	3,378,000	2	2,550,000	0	0			0	0	2	3,378,000	66,67%	22,52%	KECAMA TAN BUKI	Belum Tercapai
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat kepuasan Layanan administrasi kepegawaian SKPD (%)	100,00	7.500.000	33,33	2.342.000	100,00	1.800.000	0,00%	0			0,00%	0	33,33%	2.342.000	33,33%	31,23%	KECAMA TAN BUKI	
7.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	3	7,500,000	1	2,342,000	1	1,800,000	0	0			0	0	1	2,342,000	33,33%	31,23%	KECAMA TAN BUKI	Belum Tercapai
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	% pemenuhan Administrasi Umum Kantor (%)	100,00	320.210.226	29,17	68.130.500	100,00	83.546.000	0,00%	8.540.200			0,00%	8.540.200	32,71%	76.670.700	32,71%	23,94%	KECAMA TAN BUKI	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	31,710,226	2	3,496,000	4	8,273,000	1	1,640,200			1	1,640,200	3	5,136,200	25,00%	16,20%	KECAMA TAN BUKI	Belum Tercapai
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	13,500,000	4	4,680,000	4	5,700,000	0	0			0	0	4	4,680,000	33,33%	34,67%	KECAMA TAN BUKI	Belum Tercapai
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	3	6,000,000	1	8,400,000	1	6,000,000	0	900,000			0	900,000	1	9,300,000	33,33%	155,00%	KECAMA TAN BUKI	Belum Tercapai

7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1,200	269,000,000	400	51,554,500	371	63,573,000	70	6,000,000			70	6,000,000	470	57,554,500	39,17%	21,40%	KECAMA TAN BUKI	Belum Tercapai
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan BMD (%)	100,00	125.000.000	11,11	14.000.000	100,00	118.850.100	0,00%	2.000.000			0,00%	2.000.000	16,67%	16.000.000	16,67%	12,80%	KECAMA TAN BUKI	
7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2	42,000,000	0	0	1	36,997,000	0	0			0	0	0	0	0,00%	0,00%	KECAMA TAN BUKI	Belum Tercapai
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	12	13,000,000	0	0	2	5,800,000	0	0			0	0	0	0	0,00%	0,00%	KECAMA TAN BUKI	Belum Tercapai
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6	70,000,000	2	14,000,000	7	76,053,100	1	2,000,000			1	2,000,000	3	16,000,000	50,00%	22,86%	KECAMA TAN BUKI	Belum Tercapai
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)	100,00	712.500.000	33,33	135.846.550	100,00	151.533.900	0,00%	18.824.700			0,00%	18.824.700	41,67%	154.671.250	41,67%	21,71%	KECAMA TAN BUKI	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36	24,000,000	12	12,139,650	12	13,620,000	3	1,949,500			3	1,949,500	15	14,089,150	41,67%	58,70%	KECAMA TAN BUKI	Belum Tercapai

7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36	688,500,000	12	123,706,900	12	137,913,900	3	16,875,200			3	16,875,200	15	140,582,100	41,67%	20,42%	KECAMA TAN BUKI	Belum Tercapai
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik (%)	100,00	257.000.000	23,81	50.637.000	100,00	88.750.000	0,00%	7.752.000			0,00%	7.752.000	25,40%	58.389.000	25,40%	22,72%	KECAMA TAN BUKI	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21	230,000,000	9	47,797,000	8	77,140,000	1	7,752,000			1	7,752,000	10	55,549,000	47,62%	24,15%	KECAMA TAN BUKI	Belum Tercapai
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	14	16,000,000	4	2,840,000	3	2,110,000	0	0			0	0	4	2,840,000	28,57%	17,75%	KECAMA TAN BUKI	Belum Tercapai
7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi	3	11,000,000	0	0	2	9,500,000	0	0			0	0	0	0	0,00%	0,00%	KECAMA TAN BUKI	Belum Tercapai
7.01.02	PROGRAM PENYELENGG ARAAN PEMERINTAH AN DAN PELAYANAN PUBLIK	Peningkatan Pelayanan di Tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan (Menit)	8,00	18.468.752	0,00	5.337.000	10,00	4.500.000	0	0			0	0						Belum Tercapai

7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase kegiatan penyelenggaraan pemerintahan yang dikoordinasikan (%)	95,00	9.000.000	33,33	3.200.000	90,00	2.250.000	0,00%	0			0,00%	0	33,33%	3.200.000	37,04%	35,56%	KECAMA TAN BUKI	
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	3	9,000,000	1	3,200,000	1	2,250,000	0	0			0	0	1	3,200,000	33,33%	35,56%	KECAMA TAN BUKI	Belum Tercapai
7.01.02.2.02	Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Urusan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan (%)	95,00	9.468.752	33,33	2.137.000	90,00	2.250.000	0,00%	0			0,00%	0	33,33%	2.137.000	37,04%	22,57%	KECAMA TAN BUKI	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3	9,468,752	1	2,137,000	1	2,250,000	0	0			0	0	1	2,137,000	33,33%	22,57%	KECAMA TAN BUKI	Belum Tercapai
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan (%)	100,00	100.561.514	0,00	55.555.500	100,00	39.750.000	0	0			0	0						Belum Tercapai

7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Desa yang dikoordinasikan (%)	95,00	100.561.514	41,67	55.555.500	90,00	39.750.000	0,00%	0			0,00%	0	41,67%	55.555.500	46,30%	55,25%	KECAMA TAN BUKI	
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	21	5,500,000	7	2,250,000	7	2,100,000	0	0			0	0	7	2,250,000	33,33%	40,91%	KECAMA TAN BUKI	Belum Tercapai
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6	95,061,514	3	53,305,500	2	37,650,000	0	0			0	0	3	53,305,500	50,00%	56,07%	KECAMA TAN BUKI	Belum Tercapai
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kasus Kriminalitas di tingkat kecamatan (%)	1,00	25.539.432	0,00	18.962.400	1,00	8.100.000	0	0			0	0						Belum Tercapai
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraa n Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dikoordinasikan (%)	100,00	12.000.000	33,33	14.402.700	95,00	4.050.000	0,00%	0			0,00%	0	33,33%	14.402.700	35,09%	120,02%	KECAMA TAN BUKI	

7.01.04.2. 01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	36	12,000,000	12	14,402,700	12	4,050,000	0	0		0	0	12	14,402,700	33,33%	120,02%	KECAMA TAN BUKI	Belum Tercapai
7.01.04.2. 02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang dikoordinasikan (%)	100,00	13.539.432	33,33	4.559.700	95,00	4.050.000	0,00%	0		0,00%	0	33,33%	4.559.700	35,09%	33,68%	KECAMA TAN BUKI	
7.01.04.2. 02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	36	13,539,432	12	4,559,700	12	4,050,000	0	0		0	0	12	4,559,700	33,33%	33,68%	KECAMA TAN BUKI	Belum Tercapai

7.01.05	PROGRAM PENYELENGG ARAAN URUSAN PEMERINTAH AN UMUM	Persentase Konflik Sosial dan Keagamaan di tingkat kecamatan (%)	0,00	121.312.302	0,00	49.814.600	0,00	56.520.000	0	6.540.000			0	6.540.000						Tercapai
7.01.05.2. 01	Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah (%)	100,00	121.312.302	25,00	49.814.600	100,00	56.520.000	0,00%	6.540.000			0,00%	6.540.000	41,67%	56.354.600	41,67%	46,45%	KECAMA TAN BUKI	
7.01.05.2. 01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	900	105,000,000	300	44,114,600	300	49,080,000	0	0			0	0	300	44,114,600	33,33%	42,01%	KECAMA TAN BUKI	Belum Tercapai

7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	150	16,312,302	25	5,700,000	50	7,440,000	50	6,540,000			50	6,540,000	75	12,240,000	50,00%	75,04%	KECAMA TAN BUKI	Tercapai
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Program pemerintahan desa yang mendukung program pemerintah (%)	70,00	39.590.221	0,00	14.769.900	65,00	15.900.000	0	6.900.000			0	6.900.000						Belum Tercapai
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa yang di laksanakan (Laporan)	12,00	39.590.221	16,67	14.769.900	12,00	15.900.000	0,00%	6.900.000			0,00%	6.900.000	25,00%	21.669.900	208,33%	54,74%	KECAMA TAN BUKI	
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	3	6,000,000	0	0	1	3,300,000	0	0			0	0	0	0	0,00%	0,00%	KECAMA TAN BUKI	Belum Tercapai

7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	3	6,000,000	1	1,800,000	0	0	0	0			0	0	1	1,800,000	33,33%	30,00%	KECAMA TAN BUKI	Tidak Terlaksana
7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	3	27,590,221	1	9,492,900	1	9,300,000	1	6,900,000			1	6,900,000	2	16,392,900	66,67%	59,42%	KECAMA TAN BUKI	Tercapai
7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	0	0	1	3,477,000	1	3,300,000	0	0			0	0	1	3,477,000	0,00%	0,00%	KECAMA TAN BUKI	Belum Tercapai
							2,305,023,000		Total Realisasi (RP)				392,110,313							
													18,84	17,01						
													SR	SR						

Baruia, 21 April 2025
CAMAT BUKI

DEMPAK, S. Pd
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP. 19670312 199203 1 004

Dari tabel diatas ini dapat diketahui bahwa Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar pada melaksanakan 6 Program, 15 Kegiatan dan 34 Sub Kegiatan. Dari 34 Sub kegiatan, 6 sub kegiatan sudah mencapai target dan 28 sub kegiatan belum mencapai target.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Buki

Wilayah Kecamatan Buki terdiri dari 7 Desa serta kondisi demografis penduduk yang beraneka ragam sangat dimungkinkan perkembangan pembangunan di Kecamatan Buki lebih cepat di banding kecamatan lainnya sehingga menuntut pihak kecamatan untuk bisa bergerak luwes mengikuti perkembangan keadaan masyarakat baik itu dalam bidang pelayanan, ekonomi maupun sarana dan prasarana yang menunjang dalam kegiatan pendayagunaan aparatur dan masyarakat itu sendiri

Untuk analisis kinerja pelayanan ini disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Buki Tahun 2025 (Triwulan II)

No	Indikator Kinerja Utama OPD	Target Kinerja Capaian Renstra (2023)	Realisasi /Capaian Kinerja Capaian Rensrta tahun berjalan	Catatan Analisis
1	2	3	4	5
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	80 %		Realisasi Belum tercapai karena penilaian masih sampai triwulan II tahun Berjalan
2	Persentase Meningkatnya Fungsi Lembaga Desa yang Dikoordinasikan	71 %		Realisasi Belum tercapai karena penilaian masih sampai triwulan II tahun Berjalan
3	Tingkat solidaritas sosial di Kecamatan	71,5		Realisasi Belum tercapai karena penilaian masih sampai triwulan II tahun Berjalan
4	Tingkat toleransi di Kecamatan	70		Realisasi Belum tercapai karena penilaian masih sampai triwulan II tahun Berjalan
5	Persentase Urusan Pemerintahan Desa yang Difasilitasi	100%		Realisasi Belum tercapai karena penilaian masih sampai triwulan II tahun Berjalan
6	Peningkatan Pelayanan di Tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan	10,00 Menit		Realisasi Belum tercapai karena penilaian masih sampai triwulan II tahun Berjalan
7	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan	100,00 %		Realisasi Belum tercapai karena penilaian masih sampai triwulan II tahun Berjalan

8	Persentase kasus Kriminalitas di tingkat kecamatan	1,00 %		Realisasi Belum tercapai karena penilaian masih sampai triwulan II tahun Berjalan
9	Persentase Konflik Sosial dan Keagamaan di tingkat kecamatan	0,00 %		Realisasi Belum tercapai karena penilaian masih sampai triwulan II tahun Berjalan
10	Persentase Program pemerintahan desa yang mendukung program pemerintah	65,00 %		Realisasi Belum tercapai karena penilaian masih sampai triwulan II tahun Berjalan

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran dapat dilakukan dengan berbagai cara diantaranya dengan disusunnya Renja sebagai sebuah rangkaian cara untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan yang akan ditetapkan.

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Buki bahwa ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut :

- 1) Tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan

SKPD Berdasarkan hasil evaluasi indikator kinerja pelayanan SKPD Kecamatan Buki untuk cukup baik terlihat dari capaian indikator peningkatan pelayanan ditingkat kecamatan sudah tercapai yaitu 15 Menit untuk tahun 2024.
- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD.

Permasalahan utama yang terdapat dalam pelaksanaan tugas kinerja SKPD adalah kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, serta kurangnya Optimalisasi partisipasi masyarakat dalam kegiatan kegiatan yang berhubungan dengan Perencanaan Pembangunan .
- 3) Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala Daerah, terhadap capaian pogram nasional / internasional seperti SPM dan SDGs (Development Goals) Pencapaian Program Kerja Kecamatan Buki sebagai penjabaran visi misi kabupaten Kepulauan Selayar.
- 4) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan
 - Mewujudkan ketersediaan data / informasi sebagai upaya dukungan terhadap penyusunan dokumen perencanaan
 - Mensinergikan antara perencanaan dan pelaksanaan agar dapat tercapai target indikator yang telah direncanakan
 - Peningkatan pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Buki terdiri dari Rencana Program, Rencana Kegiatan dan Sub Kegiatan serta indikator kinerja yang akan dilaksanakan untuk Tahun Anggaran 2025.

Program Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan kumpulan kegiatan, dan sub kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran yang ditetapkan di tingkat satuan kerja dalam menunjang pencapaian sasaran di tingkat Kabupaten.

Pendanaan merupakan rencana alokasi anggaran yang bersifat indikasi dan dapat disesuaikan jika diperlukan. Sumber Perubahan pendanaan pada Kecamatan Buki untuk tahun 2025 berasal dari Perubahan APBD Kabupaten Kepulauan Selayar. Dengan demikian besarannya menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Untuk lebih jelasnya, Perubahan Rencana Kerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Indikator Kinerja, dan Pendanaan Indikatif diuraikan dalam Tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1
PerubahanRencana Kerja Kecamatan Buki Tahun 2025

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Lokasi	Target 2025		Pagu Indikatif			Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif
								Semula	Menjadi	Renja 2025	Renja 2025 Perubahan				
(1)					(1)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	
01 01					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase capaian kinerja Kecamatan Buki %	Kec. Buki	71,51%	71,51%	2.305.023.000	2.124.869.200	DAU		72,31%	1.960.005.638
						Persentase Capaian Kinerja Keuangan Kec. Buki(%)		91%	91%					95%	
01	01	2.01		Perencanaan , Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen/laporan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja yang diselesaikan tepat waktu	Kec.Buki	90%	100%	15.300.000	15.000.000	DAU		95%	16.500.000	
01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2 Dokumen	2 Dokumen	2.400.000	2.400.000	DAU		2 Dokumen	2.000.000	
01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000	3.000.000	DAU		1 Dokumen	3.000.000	
01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000	3.000.000	DAU		1 Dokumen	3.000.000	

01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		1 Dokumen	1 Dokumen	2.700.000	2.700.000	DAU		1 Dokumen	3.500.000
01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		1 Dokumen	1 Dokumen	2.100.000	2.100.000	DAU		1 Dokumen	2.500.000
01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (LAKIP) dan LKPJ.	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1 Dokumen	1 Dokumen	2.100.000	2.100.000	DAU		1 Dokumen	2.500.000
01	01	2.02		Administarsi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen/ laporan pengelolaan keuangan yang diselesaikan tepat waktu		90%	90%	1.717.923.000	1.656.819.000	DAU		95%	1.409.080.000
01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		16 orang/ Bulan	16 orang/ Bulan	1.715.223.000	1.655.919.000	DAU		16 orang/ Bulan	1.409.080.000
01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Dokumen	1 Dokumen	900.000	900.000	DAU		1 Dokumen	500.000
01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		4 Dokumen	0 Dokumen	1.800.000	0	DAU		4 Dokumen	1.000.000
01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase dokumen/laporan pengelolaan barang milik daerah yang diselesaikan tepat waktu	Kec.Buki	90%	90%	2.550.000	2.550.000	DAU		95%	11.000.000

01	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		1 Laporan	1 Laporan	2.550.000	2.550.000	DAU		1 Laporan	6.000.000
01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang memiliki predikat kinerja sangat baik		85%	85%	1.800.000	1.800.000	DAU		90%	2.500.000
01	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawaian	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)		1 Dokumen	1 Dokumen	1.800.000	1.800.000	DAU		1 Dokumen	2.500.000
01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum kantor	Kec.Buki	90%	90%	83.546.000	53.722.500	DAU		95%	116.725.638
01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		2 Paket	2 Paket	8.273.000	8.286.500	DAU		2 Paket	11.225.638
01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		3 Dokumen	3 Dokumen	5.700.000	5.700.000	DAU		4 Dokumen	4.500.000
01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)		1 laporan	1 laporan	6.000.000	6.000.000	DAU		1 laporan	2.000.000
01	01	2.03	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		371 laporan	334 laporan	63.573.000	33.736.000	DAU		400 laporan	99.000.000
01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah	Kec.Buki	90%	90%	118.850.100	69.771.800	DAU		90%	51.000.000
01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)		1 Unit	0 Unit	36.997.000	0	DAU		1 Unit	22.000.000
01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)		4 Unit	2 Unit	5.800.000	2.900.000	DAU		2 Unit	4.000.000

01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)		7 Unit	6 Unit	76.053.100	66.871.800	DAU		2 Unit	25.000.000
01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang perkantoran (%)	Kec.Buki	100%	100%	151.533.900	143.133.900	DAU		100%	247.500.000
01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 laporan	12 laporan	13.620.000	13.620.000	DAU		12 laporan	8.000.000
01	01	2.08	04	Penyedia jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 laporan	12 laporan	137.913.900	129.513.900	DAU		12 laporan	239.500.000
01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kec.Buki	100%	100%	88.750.000	79.250.000	DAU		100%	90.000.000
01	01	2.09	02	Penyedia Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		8 Unit	8 Unit	77.140.000	77.140.000	DAU		8 Unit	80.000.000
01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		3 Unit	3 Unit	2.110.000	2.110.000	DAU		5 Unit	5.000.000
01	01	2.09	10	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/rehabilitasi		1 Unit	0 Unit	9.500.000	0	DAU		1 Unit	5.000.000
01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK	Peningkatan Pelayanan di Tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan		10 menit	10 menit	4.500.000	4.500.000	DAU	Prioritas	8 menit	6.000.000
01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan (%)	Kec.Buki	90%	90%	2.250.000	1.350.000	DAU		95%	6.000.000

01	02	2.01	02	Peningkatan efektifitas Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		1 dokumen	1 dokumen	2.250.000	1.350.000	DAU		1 dokumen	3.000,000
01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Urusan pemerintahan yang diselenggaraan (%)	Kec.Buki	90%	90%	2.250.000	0	DAU		95%	3.000.000
01	02	2.02	03	Peningkatan efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		1 laporan	0 laporan	2.250.000	0	DAU		1 laporan	3.000.000
01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan (%)		100%	100%	39.750.000	28.152.000	DAU	Prioritas	100%	34.315.362
01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Desa yang dikoordinasikan (%)	Kec.Buki	90%	90%	39.750.000	28.152.000	DAU		95%	34.315.362
01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum MusyawarahPerencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)		7 lembaga	0 lembaga	2.100.000	0	DAU		7 lembaga	2.000.000
01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		2 laporan	2 laporan	37.650.000	28.152.000	DAU		2 laporan	32.315.362
01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kasus Kriminalitas di tingkat kecamatan (%)		1%	1%	8.100.000	3.330.000	DAU	Prioritas	1%	8.715.013
01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum (%)		95%	95%	4.050.000	1.650.000	DAU		100%	4.000.000
01	04	2.01	01	Sinegritas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		12 laporan	12 laporan	4.050.000	1.650.000	DAU		12 laporan	4.000.000

01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (%)		95%	95%	4.050.000	1.650.000	DAU		100%	4,715,013
01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		12 laporan	12 laporan	4.050.000	1.650.000	DAU		12 laporan	4.715.013
01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Konflik Sosial dan Keagamaan di tingkat kecamatan (%)		0%	0%	56.520.000	56.520.000	DAU		0%	41.396.310
01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang di selenggarakan (%)		90%	90%	56.520.000	56.520.000	DAU		95%	41.396.310
01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan NKRI	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		300 orang	300 orang	49.080.000	49.080.000	DAU		300 orang	36.000.000
01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, Ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti PembinaanKerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional		25 orang	25 orang	7.440.000	7.440.000	DAU		25 orang	5.396.310

01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Program pemerintahan desa yang mendukung program pemerintah (%)		65%	55%	15.900.000	13.500.000	DAU	Gerbang sari	70%	13.138.800
01	06	2.01		Persentase pembinaan dan Pengawasan yagn difasiitasi, direkomendasi, dikoordinasikan (%)	Persentase Keterpenuhan Fasilitas, Rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		70%	70%	15.900.000	13.500.000	DAU		80%	11.095.960
01	06	2.01	01	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Penyalahgunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan PendayagunaanAset Desa (Dokumen)		1 dokumen	1 dokumen	3.300.000	3.300.000	DAU		1 dokumen	2.000.000
01	06	2.01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif		1 dokumen	1 dokumen	9.300.000	9.300.000	DAU		1 dokumen	9.095.960
01	06	2.01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi PendampinganDesa di Wilayahnya (Laporan)		1 laporan	1 laporan	3.300.000	2.100.000				
JUMLAH									2.305.023.000	2.124.869.200				2.071.600.802,00

Baruia, 21 April 2025
CAMAT BUKI

DEMPAK, S. Pd
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP. 19670312 199203 1 004

BAB IV

Penutup

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Buki Tahun 2025 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kecamatan Buki Tahun 2021-2026, yang memuat antara lain evaluasi atas pelaksanaan rencana kerja, telaahan terhadap kebijakan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Buki, tujuan dan sasaran renja Kecamatan, serta program dan kegiatan.

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Buki Tahun 2025 akan menjadi acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Kecamatan Buki Tahun 2025 dengan mempertimbangkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Perubahan Tahun 2025.

Untuk menjaga efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program, setiap unit kerja dalam lingkup Kecamatan Buki wajib melakukan pengendalian dan evaluasi atas hasil pelaksanaan rencana kerja Kecamatan Buki ini. Hasil evaluasi ini menjadi bahan bagi penyusunan perubahan rencana kerja dan anggaran Kecamatan Buki Tahun 2025.

Baruia, 21 April 2025
CAMAT BUKI,

DEMPAK, S. Pd
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP. 19670312 199203 1 004

